

BAB I



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebebasan atau kehendak bebas memiliki pengertian yang sama secara umum. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa pilihan beserta tindakan dilakukan dengan bebas bila tidak kita kehendaki. Orang yang menghendaki sesuatu berarti ia bebas. Kebebasan atau kehendak bebas terasa begitu nyata. Ia biasanya diartikan oleh orang-orang dengan menunjukkan langsung tindakan yang dianggapnya bebas, misalnya mengutarakan pendapat di depan publik.

Akan tetapi, kebebasan dan kehendak bebas dibedakan oleh filsuf berdasarkan konteks yang dibicarakan, yaitu, kebebasan digunakan ketika mempersoalkan tindakan manusia dalam konteks politik, sedangkan kehendak bebas merupakan kemampuan individu dalam membuat keputusan: Aristoteles menggunakan term “terserah pada kita” untuk mendeskripsikan tindakan yang dikontrol dan bukan menggunakan kebebasan dalam etika *nichomachea*.¹ Kees Bertens melihat kehendak bebas sebagai bentuk kebebasan psikologis individu yang dengannya manusia mampu mengembangkan dan mengarahkan hidupnya, sementara kebebasan juga dipahami berciri sosio-politik²

Pembedaan ini membawa pengertian bahwa kehendak dapat bebas sedangkan tindakan tidak, dan sebaliknya, kehendak tidak bebas dan tindakan nampak bebas. Pembedaan ini juga dapat bertentangan dengan pengertian orang-

1 “ ... But in the ethics though Aristotle talked of us as having control of how we act he stated that our actions are *eph hemin*, or, literally, ‘up to us’ – he did not actually use *eleutheria*, the Greek word for freedom, to describe this action control. *Eleutheria* was still a term used only in political discussion as a name for political freedom or liberty.” THOMAS PINK, *Free Will Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York, 2004, 3.

2 K. BERTENS, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 2011, 117.

orang mengenai kebebasan pada umumnya. Orang yang menghendaki sesuatu tidak dengan otomatis ia dapat bertindak bebas. Seseorang boleh saja menghendaki agar pendapatnya disampaikan di depan umum, namun tindakannya tidak bebas karena peraturan pemerintah membatasi atau melarangnya. Kebebasan akan dipersoalkan dalam konteks sosial-politik dalam contoh ini. Kehendak dapat menjadi tidak bebas dalam kasus seseorang yang sangat tunduk pada hukum biologis ataupun alam di luar dirinya. Kehendak seorang pecandu seks akan terus dipaksa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, yang mana dilihat kasatmata tindakannya nampak bebas.

Kees Bertens mengartikan kebebasan secara positif dan negatif, yaitu bebas dari dan bebas untuk, meskipun lebih jelas dan mudah memahami kebebasan secara negatif baik dalam konteks politik maupun individu.³ Ia memahami kebebasan sebagai bebas dari absolutisme dan kolonialisme dalam sosial-politik, sedangkan kebebasan sebagai bebas dari paksaan fisik, perampasan hak-haknya, tekanan batin, paksaan moral, dan eksistensial dalam konteks individu. Bertens juga menunjukkan kebebasan tidaklah absolut tanpa batas. Yang membatasi kebebasan: lingkungan, orang lain dan generasi mendatang, serta fisik maupun psikis. Melalui cara mengartikan kebebasan, Bertens menunjukkan sekaligus arti dari tanggung jawab. Akan tetapi, ia hanya mengartikan tanggung jawab sebatas sebab dari kebebasan. Orang bertindak bebas, maka ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena terdapat klasifikasi kebebasan, tanggung

3 “Rupanya kebebasan paling mudah dimengerti dengan cara negatif ini. Demikian juga dalam hidup sehari-hari “bebas” dipahami sebagai “terlepas”, “tidak ada”, “tanpa”... Jauh lebih sulit ialah menjelaskan kebebasan secara positif. “kebebasan untuk” harus diisi oleh manusia sendiri...” *Ibid.*, 126.

jawab juga memiliki tingkatan.⁴

Dari cara Bertens mengartikan kebebasan yang cenderung secara negatif, tampak adanya cara lain memahami kebebasan, yaitu dengan memahami determinisme,⁵ tanggung jawab dan moralitas itu sendiri. Alasannya, memahami kebebasan pasti menuntut juga memahami hal tersebut. Mereka selalu berkaitan.⁶ Memang kebebasan akan sangat sulit jika diartikan secara positif, seperti yang telah diungkapkan oleh Bertens. Bebas untuk sebagai kata kunci pengertian kebebasan secara positif tidak cukup memberikan pengertian kepada kita mengenai kebebasan, karena ia tidak memberikan batasan untuk sesuatu yang sedang didefinisikan, dalam hal ini adalah kebebasan. Mengartikan kebebasan secara positif sama halnya menyatakan rumah sakit adalah tempat untuk merawat orang-orang sakit, padahal orang-orang sakit dapat saja dirawat di rumahnya dan di dalam rumah sakit pun terjadi transaksi ekonomi. Pada akhirnya, mengartikan kebebasan melalui memperhatikan determinisme⁷ maupun tanggung jawab⁸ mirip dengan mengartikan kebebasan secara negatif, karena secara tidak langsung akan menunjukkan batasan kebebasan.

Secara umum, persoalan mengenai kebebasan adalah tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai pengertian hal-hal yang berkaitan dengan

4 *Ibid.*, 99-144.

5 Determinisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa terdapat satu kemungkinan yang pasti dari akibat suatu hal sebelumnya yang di luar kendali manusia.

6 Keterkaitan dari hal tersebut akan terlihat dari contoh berikut: seorang akan dibunuh jika tidak menuruti kehendak si pengancam untuk mencuri. Si pengancam adalah orang yang paling bertanggung jawab penuh atas tindakan pencurian, karena kehendaknya otonom menentukan dirinya sendiri. Kehendaknya memilih untuk melawan moralitas. Maka dari itu ia bertanggung jawab atas tindakannya yang melawan moral.

7 Misalnya apabila kita melihat determinisme terjadi pada tubuh manusia, kita dapat mengatakan bahwa kebebasan merupakan yang sesuai dengan determinisme tubuh.

8 Misalnya apabila kita mengartikan tanggung jawab sebagai akibat dari kebebasan, kita akan mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak langsung ketika bertindak secara tidak sengaja merugikan orang lain.

kebebasan. Kita dapat mengatakan bahwa kebebasan tidak cocok dengan determinisme, karena kebebasan haruslah otonom, yakni, tidak ditentukan dari luar. Akan tetapi, kita dapat juga berpendapat bahwa tanggung jawab tidak selalu diletakkan pada kehendak, karena pada kenyataannya meskipun kita tidak melakukan suatu tindakan, kita dapat merasa bertanggung jawab atas dasar perasaan. Konsekuensinya, moralitas sulit dimengerti.

Namun demikian, persoalan mengenai kebebasan itu sendiri dapat kita rumuskan dalam pertanyaan berikut: Apakah dunia bersifat deterministik? Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Apakah kehendak bebas manusia dipengaruhi oleh sifat deterministik dunia? Dan apakah kehendak bebas manusia selalu memiliki konsekuensi langsung dengan tanggung jawab moral?⁹ Pertanyaan ini menyoal kebebasan berkaitan dengan determinisme.

Pandangan para filsuf mengenai kebebasan, khususnya yang berkaitan dengan determinisme dapat digolongkan menjadi dua, *incompatibilism* dan *compatibilism*.¹⁰ *Incompatibilism* meyakini kehendak bebas tidak berhubungan dengan determinisme alam. Ia dibagi menjadi *libertarianisme* dan *hard incompatibilism*. Menurut *libertarianisme* manusia memiliki kehendak bebas dan tidak dipengaruhi oleh determinisme, sedangkan *hard incompatibilism* manusia tidak memiliki kehendak bebas dan tidak dipengaruhi oleh determinisme.

Compatibilism meyakini kehendak bebas dipengaruhi oleh determinisme. *Compatibilism* mempercayai manusia memiliki kehendak bebas, meskipun berada dalam dunia yang sepenuhnya deterministik. Baginya kebebasan untuk membuat

9 Lih. JOHN MARTIN FISCHER, *Op.Cit.*, 2.

10 *Ibid.*, 3.

keputusan merupakan sesuatu realitas nyata, dan tak tergoyahkan, maka dari itu, keputusan manusia sepenuhnya didasarkan pada kesengajaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹¹ Dalam sejarah perdebatannya, *Compatibilism* menantang *Incompatibilism* untuk menjelaskan bagaimana unsur kesengajaan sehingga manusia dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral, jika kehendak bebas manusia tidak dipengaruhi oleh determinisme. Menurut mereka konsekuensi dari kehendak bebas yang tidak berkaitan dengan determinisme adalah bahwa tindakan manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,¹² karena otonomi kehendak (dapat juga disebut kesengajaan) dapat diragukan sepenuhnya.

Dalam konteks perdebatan itu, Immanuel Kant dianggap sebagai pembela terbesar dari kubu *Incompatibilism*¹³ pada abad pencerahan.¹⁴ Ia tergolong filsuf *libertarianisme*. Dengan demikian, Kant dapat juga dinilai sebagai filsuf yang menyediakan argumen kebebasan, determinisme, tanggung jawab dan moralitas dengan baik untuk menjawab tantangan *compatibilism*.

Kant juga melihat persoalan kebebasan adalah sekaligus persoalan moralitas. Baginya, kebebasan merupakan syarat untuk membuat hukum universal dalam bertindak. Hukum universal tersebut, sebagaimana keinginannya membangun teori etika, harus murni berdasarkan rasio melulu. Karena kebebasan

11 Mayoritas Penganut *compatibilism* adalah filsuf dengan tradisi Inggris. Misalnya John Locke (1632-1704) memahami kebebasan sebagai kemampuan subjek dalam membuat keputusan, dan dibedakan dengan kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan term yang absurd, karena term tersebut berarti menghubungkan kemampuan dengan kemampuan lainnya. Kebebasan ditandai dengan tindakan bebas, bukan hanya pada taraf memutuskan dengan bebas. Lih. JAMES A. HARRIS, *Of Liberty and Necessity The Free Will Debate in Eighteenth-Century British Philosophy*, Oxford University Press, New York, 2005, 23.

12 ROBERT KANE, *Libertarianism*, dalam FISCHER, JOHN MARTIN, et al. *Four Views on Free Will*, Blackwell Publishing, Malden Massachusetts, 2007, 9.

13 *Ibid.*, 18.

14 Mengenai pencerahan menurut Kant lihat daftar karya Kant pada masa kritisisme.

merupakan syarat untuk membuat hukum tindakan yang mana hukum tersebut tidak ditemukan di luar rasio manusia, Kant mengartikan kebebasan sebagai otonomi kehendak. Bagi Kant persoalan moralitas adalah menemukan atau membangun pondasi sebagai pijakan prinsip tertinggi dari moralitas yang terlepas dari hal indrawi. Apabila hal tersebut berhasil dilakukan, kita dapat menemukan argumentasi mengenai kebebasan beserta hal yang terkait dengannya.

Beberapa ahli etika saling bersilang pendapat mengenai usaha yang dilakukan Kant, khususnya mengenai argumentasi Kant yang menyatakan otonomi moral. Ada yang melihat bahwa pemikiran Kant mengenai moral sebagai salah satu biang keladi relativisme moral dewasa ini.¹⁵ Etika Kant begitu kuat memberi tekanan pada kewajiban sebagai bentuk norma moral konkret, sehingga menjadi etika yang berat sebelah. Ia juga menghilangkan aspek orientasi etika normatif. Sementara itu, beberapa ahli lainnya¹⁶ menilai pandangan Kant mengenai moralitas merupakan topik sentral dari filsafat moral kontemporer, karena ia telah menggeser wacana etika dari kebahagiaan dan kebajikan menjadi soal prinsip. Mereka melihat Kant dengan pandangan otonominya, justru ingin membuktikan bahwa prinsip tersebut bersifat rasional dan universal berada pada tiap manusia, tidak hanya pada segelintir orang pintar saja. Maka dari itu, pemikiran Kant tidak dapat dikategorikan relativis.¹⁷ Benarkah demikian?

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajak untuk membaca kembali

15 AGUSTINUS RYADI, *Relativisme Moral: Ketidakseimbangan Etika Normatif*, dalam Xaverius Chandra, (Ed.), *Menanggapi Relativisme*, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2012,58.

16 Misalnya J. B. Schneewind. Lih. J. B. SCHNEEWIND, *Why Study Kant's Ethics?* dalam IMMANUEL KANT, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Allen W. Wood, (Ed), Vail-Ballou Press, New York 2002, 83 - 91.

17 John Rawl (1921-2002) misalnya, justru sangat optimis terhadap konsep otonomi Kant. Ia mengartikan otonomi moral Kant dengan Person moral.

pemikiran Kant mengenai etika. Dengan demikian, kita dapat mempertimbangkan perbedaan pendapat dari beberapa ahli di atas, termasuk menjawab tantangan dari *compatibilism* untuk menyediakan penjelasan yang memadai mengenai kebebasan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan dasar dalam skripsi ini adalah apakah kebebasan menurut Immanuel Kant dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (GMM). Kant menjelaskan kebebasan secara mendalam dalam *Critique of Pure Reason* (CPuR) maupun *Critique of Practical Reason* (CPracR), akan tetapi, penulis menggunakan GMM sebagai sumber utama karena di sana termuat pemikiran Kant mengenai moralitas, termasuk kebebasan secara lebih utuh. Kedua karya dengan tema *Critique* memang telah menjelaskan sistem pemikiran Kant dengan lengkap mengenai epistemologi maupun etika, khususnya *Critique of Practical Reason* yang menjelaskan tentang pengetahuan moral untuk dijalankan dalam tindakan konkret. Maka dari itu, di sana, kebebasan dilihat dari epistemologi dan kemungkinan penerapannya. Berbeda dari CPracR, GMM sendiri berbicara mengenai etika yang berusaha memberi pendasaran pada metafisika moral, yaitu semacam garis besar prinsip-prinsip murni tindakan, artinya, kita tidak akan melihat dasar argumentasi Kant atas keterkaitan antara kebebasan dengan rasio maupun deterministik alam dalam CPuR, CpracR ataupun *Metaphysics of Morals*, melainkan dalam GMM.¹⁸

Tulisan ini merupakan refleksi etika mengenai kebebasan, sehingga

18 Lih. Perbedaan tujuan GMM dengan *Critique of Pure Reason* maupun *Critique of Practical Reason* dalam IMMANUEL KANT, *Op.Cit.*, 7.

penulis tidak mempersoalkan kebebasan dalam konteks politik yang mana Kant membahasnya dalam *Metaphysics of Morals* dengan mempertimbangkan kebebasan sebagai hak paling awal berhadapan dengan sesamanya.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Kebebasan Menurut Immanuel Kant Dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals*” adalah memenuhi prasyarat program studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan memperdalam pemahaman kebebasan, khususnya berhadapan dengan persoalan determinisme.

1.4. METODE PENULISAN

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam menjawab pertanyaan utama. Artinya, tulisan ini adalah hasil studi olah pikir penulis atas berbagai buku yang mengulas pemikiran Kant atas kebebasan sebagai referensi orang kedua dengan sumber utama berjudul IMMANUEL KANT, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Allen W. Wood, (Ed), Vail-Ballou Press, New York 2002.

1.5. SKEMA PENULISAN

Tulisan ini diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang persoalan, batasan masalah, tujuan, metode, skema penulisan serta daftar sumber acuan dalam skripsi ini. Latar belakang menunjukkan persoalan kebebasan, yaitu kebebasan yang nampaknya cukup mudah dipahami masih membutuhkan

penjelasan yang lebih dalam lagi. Penulis menunjukkan alasan menggunakan pemikiran Kant untuk menjelaskan kebebasan juga dalam latar belakang. Penulis hanya membatasi diri pada pertanyaan apakah kebebasan menurut Immanuel Kant dalam karyanya GMM pada bagian rumusan masalah. Seperti yang telah dikatakan pada bagian tujuan penulisan, penulis menunjukkan dua tujuan dari skripsi ini, yaitu memenuhi prasyarat studi filsafat program strata satu di UKWMS dan memperdalam pemahaman kebebasan. Penulis juga telah mengatakan bahwa metode penulisan skripsi ini adalah studi pustaka mengenai beberapa buku yang disertakan dalam daftar pustaka. Bagian skema penulisan menunjukkan skema dari seluruh BAB dalam skripsi ini.

Menginjak BAB II, Penulis mengajak untuk mengenal Immanuel Kant. Pembahasan ini ditekankan pada latar belakang yang menyebabkan ia mengartikan kebebasan. Untuk itu, langkah pertama penulis adalah menjelaskan riwayat hidupnya. Di dalamnya, penulis sisipkan figur atau karakter dari Immanuel Kant berdasarkan pendapat beberapa filsuf yang menaruh perhatian khusus kepadanya. Penjelasan mengenai latar belakang pemikiran dan karya Immanuel Kant berada pada sub-bab pemikiran umum Immanuel Kant. Sebagai penutup BAB II, penulis memberi kesimpulan mengenai sosok Kant yang berhubungan dengan pemahamannya mengenai kebebasan pada bagian rangkuman.

Pemikiran mengenai epistemologi Kant sebagai dasar etikanya merupakan pokok bahasan BAB III. Filsafat Kant dapat dipilah berdasarkan pertanyaan yang telah ia ajukan secara urut: apa yang dapat saya ketahui? Apa yang harus saya

lakukan? Serta, apa yang dapat saya harapkan? Adanya hubungan antara pertanyaan pertama dengan kedua merupakan latar belakang dari BAB III. Bab ini hanya terdiri dari tiga bagian sub-bab, yaitu, Epistemologi menurut Kant, Etika deontologi dan rangkuman dari penulis. Epistemologi menurut Kant adalah bagian yang menjelaskan justifikasi pengetahuan beserta persoalannya. Bagian etika deontologi menunjukkan argumentasi Kant mengenai kewajiban yang ia kembangkan dari filsuf pendahulunya. Penulis memberi catatan bahwa epistemologi memberikan pertanggungjawaban etika deontologi dengan memadai.

BAB IV berisi penjelasan penulis mengenai konsep subjek menurut Kant, skematika GMM, kebebasan menurut Kant dalam GMM, serta catatan kritis dari penulis. Telah dikatakan bahwa konsep otonomi begitu penting dalam pemikiran Kant mengenai etika, karena itu, pada awal bab ini penulis akan mempersoalkan konsep subjek menurut Kant sebagai pengantar dalam ke dalam pemikirannya mengenai kebebasan.

Akhir dari tulisan ini adalah kesimpulan atas pertanyaan utama yang diajukan penulis. Kesimpulan ini berdasarkan keseluruhan bab yang sebelumnya mengulas kebebasan Kant (BAB II - BAB IV).